



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENGALOKASIAN ANGGARAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa pengalokasian anggaran dana Desa adalah wujud pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian anggaran dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
9. Peraturan Bupati Konawe Nomor 21 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2020 Nomor 376);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2024 Nomor 275)

PARAF KOORDINASI

A h t

11. Peraturan Bupati Konawe Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2024 Nomor 690);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ANGGARAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Konawe.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah Daerah Kabupaten Konawe yang dipimpin oleh Camat
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

PARAF KOORDINASI

A B C

11. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Konawe.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan Desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
17. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut KASI adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dan sekretaris Desa berdasarkan pembagian seksi di bidang Pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
18. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut KAUR adalah Perangkat desa yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam Tata Usaha dan Umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan.
19. Kepala Dusun adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah dusun.
20. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk melalui musyawarah setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa
22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

PARAF KOORDINASI

1 1 1

23. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
24. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
25. PPKD adalah berasal dari Unsur Perangkat Desa, yang terdiri Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi, dan Kaur Keuangan.
26. Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Urusan dan Kepala Seksi berdasarkan bidang kegiatan.
27. Bendahara adalah Kepala Urusan Keuangan.
28. Petugas Keagamaan Desa adalah Imam Desa, Pendeta, Pastor, Mangku dan Biksu.
29. Orang Tua yang selanjutnya disebut *Tonomotu'o* dalam bahasa suku Tolaki adalah "*Tonomotu'o* yang di tuakan dalam suatu wilayah/kampung tersebut yang paham mengenai masalah adat, agama dan selalu diminta saran/pertimbangan sebelum pengambilan suatu Keputusan".
30. Juru Bicara yang selanjutnya disebut *Pabitara* dalam bahasa suku Tolaki adalah "juru penerang adat yang tugasnya adalah menyampaikan suatu pemberitahuan kepada orang banyak".
31. Osudo adalah perangkat pemangku adat yang bertugas membantu tolea, terutama mengatur seserahan yang akan disuguhkan atau yang akan diletakkan dalam pelaksanaan adat
32. Pombewuleako atau biasa di sebut Tina Mbabi atau Tina Ndolea yang tugasnya adalah menyuguhkan sirih pinang sebagai tanda akan di mulai upacara adat.
33. ADD Kurang Bayar adalah Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dan Tahun 2024 yang belum dibayarkan pada Pemerintah Desa dan seluruh ADD kurang bayar tersebut akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2025.
34. UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. adalah usaha produktif yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha
35. Majelis taklim adalah sebuah wadah organisasi yang merupakan tempat berkumpulnya orang banyak untuk mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi antara umat Islam

PARAF KOORDINASI


BAB II ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 109.435.029.274 (seratus Sembilan miliar empat ratus tiga puluh lima juta dua puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh empat rupiah).
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu besaran ADD untuk setiap Desa.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari DAU (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) yang diterima oleh Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025, tidak termasuk dana bagi hasil - cukai hasil tembakau, dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal kemampuan keuangan daerah belum memenuhi untuk mengalokasikan anggaran ADD sebesar 10% (sepuluh perseratus) sebagaimana dimaksud ayat (3), Pengalokasian ADD dilakukan secara bertahap.
- (5) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, indeks kesulitan geografi dan indeks kinerja Desa.
- (6) Penggunaan ADD kurang bayar mengacu pada Alokasi Anggaran Dana Desa tahun anggaran 2025.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang tercantum dalam APBDesa.
- (2) Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh ADD direncanakan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat di Desa.
- (3) Seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

BAB III PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Pengelolaan ADD dilaksanakan oleh PPKD yang terdiri dari unsur Perangkat Desa.



- (2) PPKD sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Susunan keanggotaan PPKD, terdiri atas:
 - a. Sekretaris Desa selaku Koordinator;
 - b. Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan; dan
 - c. Kaur keuangan selaku Bendahara.
- (4) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan ADD, meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan ADD.

Pasal 5

- (1) Tim fasilitasi tingkat Daerah merupakan unsur Pimpinan Daerah (PD) Kabupaten Konawe yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD.
- (2) Tim fasilitasi tingkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Bupati sebagai Pembina;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Pengarah;
 - c. Kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe sebagai Ketua Tim;
 - d. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Konawe sebagai Sekretaris Tim;
 - e. Asisten I Bidang Tata Praja sebagai Anggota;
 - f. Kepala Inspektorat Kab. Konawe sebagai Anggota;
 - g. Kepala Bappeda Kabupaten Konawe sebagai Anggota;
 - h. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe sebagai Anggota;
 - i. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Konawe sebagai Anggota;
- (3) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas:
 - a. merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya;
 - b. melaksanakan sosialisasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - c. menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;
 - d. memberikan pelatihan/orientasi kepada PPKD tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD;
 - e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Inspektorat Kabupaten Konawe;
 - f. melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pengawasan atas pelaksanaan ADD; dan
 - g. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya, tim fasilitasi Kabupaten dibantu oleh tim Kesekretariatan Kabupaten;
- (5) Tim Kesekretariatan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (4), dengan susunan komposisi sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI

K h t

- a. Sekretaris Dinas PMD sebagai Ketua;
 - b. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagai Sekretaris;
 - c. Pejabat Fungsional yang membidangi Pemberdayaan Desa dan Kelurahan sebagai anggota;
 - d. Pejabat Fungsional yang membidangi Pemerintahan Desa sebagai anggota; dan
 - e. Pejabat Fungsional yang membidangi Pengembangan Ekonomi Desa sebagai anggota.
- (6) Tim Kesekretariatan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (4) mempunyai tugas:
- a. melakukan fungsi administrasi umum tentang pelaksanaan ADD;
 - b. melakukan verifikasi proposal ADD;
 - c. memproses rekomendasi pencairan ADD;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi serta pengawasan atas pelaksanaan ADD; dan
 - e. melaporkan kepada tim fasilitasi Kabupaten melalui Inspektorat Kabupaten Konawe atas adanya indikasi dugaan penyalahgunaan dana ADD.
- (7) Sekretaris memimpin Kelompok Kerja Kesekretariatan untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dalam menangani ADD.

Pasal 6

- (1) Tim Fasilitasi Kecamatan merupakan unsur Perangkat Kecamatan yang memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan ADD dengan susunan komposisi sebagai berikut:
- a. Camat sebagai Ketua Tim;
 - b. Kasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa sebagai Sekretaris; dan
 - c. Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesra sebagai Anggota.
- (2) Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan Musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam wilayah Kecamatan;
 - b. membantu PPKD dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya;
 - c. merekomendasi usulan pencairan ADD dari Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - d. memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD;
 - e. memfasilitasi PPKD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban ADD;
 - f. melakukan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan di Desa yang pembiayaannya bersumber dari ADD.

BAB IV

BESARAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Besaran Alokasi Dana Desa

Pasal 7

- (1) Besaran ADD Tahun 2025 terbagi empat kelompok yaitu:



- a. Kelompok A sebanyak 263 Desa masing-masing sebesar Rp 118.724.275.300,- (Seratus delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
 - b. Kelompok B sebanyak 22 Desa masing-masing sebesar Rp 8.848.063.400,- (Delapan milyar delapan ratus empat puluh delapan juta enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
 - c. Kelompok C sebanyak 5 Desa masing-masing sebesar Rp 2.049.731.500,- (Dua milyar empat puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah); dan
 - d. Kelompok D sebanyak 1 Desa sebesar Rp 417.641.400,- (Empat ratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (2) Desa yang mendapatkan besaran ADD sebagaimana ayat (1) huruf a adalah Desa yang Petugas Keagamaannya hanya terdiri dari Imam Desa.
 - (3) Desa yang mendapatkan besaran ADD sebagaimana ayat (1) huruf b adalah Desa yang Petugas Keagamaannya yang terdiri dari Imam Desa dan Mangku.
 - (4) Desa yang mendapatkan besaran ADD sebagaimana ayat (1) huruf c adalah Desa yang Petugas Keagamaannya yang terdiri dari Imam Desa, Mangku dan Pendeta.
 - (5) Desa yang mendapatkan besaran ADD sebagaimana ayat (1) huruf d adalah Desa yang Petugas Keagamaannya hanya terdiri dari Imam Desa, Mangku, Pendeta dan Pastor.
 - (6) Rincian besaran ADD tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana Desa

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Kegiatan dan keuangan ADD direncanakan secara terbuka melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.
- (2) Hasil Musayawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.
- (3) Arah penggunaan ADD yaitu dibagi atas 2 (dua) bidang belanja yaitu belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Belanja Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa.
- (4) Belanja ADD untuk bidang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa diprioritaskan untuk tunjangan dan penghasilan tetap Kepala Desa, penghasilan tetap Perangkat Desa, operasional kegiatan pemerintah Desa pembentukan koperasi desa merah putih, tunjangan BPD, insentif RT, Perawat Desa, Guru TPQ, Imam Desa, Pendeta, Mangku dan Biksu/Pastor.

PARAF KOORDINASI

f f f

- (5) Belanja ADD untuk kegiatan pembinaan ke masyarakatan Desa dipergunakan untuk biaya operasional PKK, LPM, Karang Taruna, Majelis Taklim, Insentif Tonomotuo, Pabitara, Osudo, dan Pombewuleako
- (6) Belanja ADD untuk kegiatan pemberian bantuan modal usaha bagi setiap UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) di setiap desa.
- (7) Rincian penggunaan masing-masing Bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termuat dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III, dan lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Bagi kepala Desa dan/atau pejabat kepala desa dan sekretaris desa yang berstatus PNS diberikan tunjangan dari penghasilan tetap Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.

Pasal 10

- (1) Pemberian insentif tenaga Keperawatan Desa sebagaimana pada Pasal 8 ayat (4), diperuntukan untuk tenaga keperawatan yang bertugas di desa berdasarkan Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan tenaga Keperawatan Desa tahun 2025.
- (2) Tenaga Keperawatan yang ditugaskan di desa adalah Tenaga Keperawatan yang telah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tenaga Keperawatan yang akan bertugas di Desa diprioritaskan kepada tenaga perawat yang berdomisili di Desa tersebut dan diusulkan Kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe.
- (4) Bagi Desa yang tidak mempunyai tenaga keperawatan di Desanya dapat meminta tenaga keperawatan desa melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe.

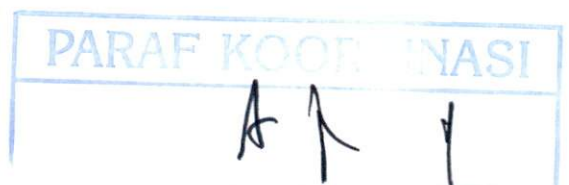
BAB V

MEKANISME PERMINTAAN, PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD

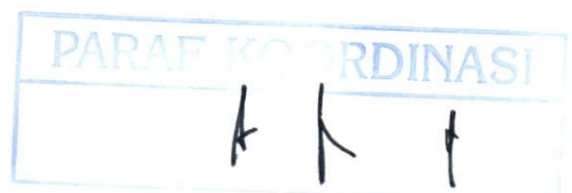
Bagian Kesatu Mekanisme Permintaan

Pasal 11

- (1) Kepala Desa mengajukan proposal permohonan permintaan, penyaluran dan pencairan ADD untuk ditransfer ke rekening kas Desa melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Konawe.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap bulan dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran.
- (3) Permintaan pencairan ADD diajukan kepada Bupati Konawe melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe untuk diberikan surat rekomendasi pencairan ADD kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe.



- (4) Desa yang diberikan surat rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah yang telah memenuhi syarat pengajuan.
- (5) Syarat pengajuan pencairan ADD, meliputi:
- a. LPPD Tahun Anggaran 2024;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD Tahun Anggaran 2024 yang telah diverifikasi oleh tim fasilitasi Kecamatan;
 - c. bukti setoran Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe;
 - d. fotocopy Peraturan Desa Tentang RKPDesa Tahun Anggaran 2025.
 - e. Fotocopy Peraturan Desa Tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025.
 - f. Keputusan Bupati Konawe tentang Pengangkatan tenaga perawat Desa tahun anggaran 2025.
 - g. berita acara musyawarah Desa tentang penggunaan ADD Tahun Anggaran 2025;
 - h. rencana anggaran biaya penggunaan ADD Tahun Anggaran 2025;
 - i. rencana penggunaan dana ADD tahun anggaran 2025;
 - j. Foto copy KTP Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara;
 - k. Foto copy Keputusan Bupati Konawe tentang Pengangkatan Kepala Desa;
 - l. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 - m. foto copy Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Ketua RT, Guru TPQ, Imam Desa, Pendeta, Mangku, Biku/Pastor, Tonomotuo dan Pabitara;
 - n. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - o. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Tim Penggerak PKK Desa;
 - p. Foto copy Keputusan Bupati Konawe tentang Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa;
 - q. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Karang Taruna;
 - r. surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas PMD Kabupaten Konawe bahwa Pengimfutan Aplikasi PRODESKEL sudah dilaksanakan;
 - s. surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas PMD Kabupaten Konawe bahwa Pengimfutan Aplikasi EPDESKEL sudah dilaksanakan;
 - t. surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas PMD Kabupaten Konawe bahwa Pengimfutan Aplikasi SIPADES sudah dilaksanakan;
 - u. surat pernyataan tanggung jawab mutlak terhadap penggunaan Anggaran ADD Tahun Anggaran 2025 bermaterai 10000; dan
 - v. rekomendasi Camat.



Pasal 12

Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, selanjutnya ditindak lanjuti oleh tim kesekretariatan tingkat Kabupaten Konawe untuk dilakukan verifikasi sebagai dasar Penerbitan Surat Rekomendasi Pencairan ADD tahun anggaran 2025.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa

Pasal 13

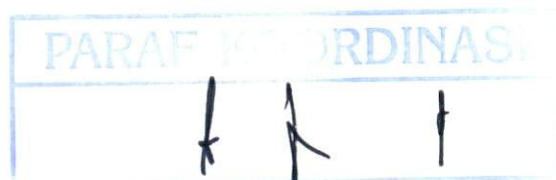
- (1) Pencairan ADD untuk masing-masing Desa dilakukan oleh Kepala Desa bersama Kaur Keuangan selaku bendahara Desa setelah mendapat surat rekomendasi pencairan ADD dari Kepala Dinas.
- (2) Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui transfer ke rekening kas Desa oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan dan aset Daerah.
- (3) ADD yang ditransfer ke rekening kas Desa menjadi pendapatan Desa yang dimasukkan dalam APBDDesa tahun anggaran 2025.
- (4) Pencairan ADD untuk masing-masing Desa hanya dapat dilakukan oleh Kepala Desa bersama Kepala Urusan Keuangan selaku bendahara Desa yang dilaksanakan setelah adanya persetujuan surat rekomendasi tertulis pencairan ADD dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Bupati Konawe.
- (5) Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui transfer ke rekening kas Desa oleh BPKAD Kabupaten Konawe dan tidak diperbolehkan melakukan pemindahan bukuan Anggaran ADD ke rekening lainnya.
- (6) ADD yang ditransfer ke rekening kas Desa menjadi pendapatan Desa yang dimasukkan dalam APBDDesa tahun anggaran 2025.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dan laporan pertanggungjawaban ADD kepada Bupati cq. Kepala Dinas PMD melalui Camat dengan tembusan Inspektorat Daerah.
- (2) Penyampaian Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Laporan realisasi dan Laporan pertanggungjawaban ADD tahun anggaran sebelumnya paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban ADD tahap I paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan; dan



- c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban ADD Tahap II paling lambat tanggal 7 Oktober tahun anggaran berjalan.
- (3) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus verifikasi oleh sekretaris Desa sebagai Koordinator PPKD dan disahkan oleh Kepala Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (5) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan Desa.
- (6) Seluruh kegiatan yang bersumber dari ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif teknis dan hukum.
- (7) Kaur Keuangan Desa sebagai Wajib Pungut atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak lainnya wajib untuk memungut dan menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Laporan Realisasi Penggunaan keuangan dan laporan pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format dalam aplikasi siskeudes dan mencakup:
 - a. jenis kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan; dan
 - b. laporan realisasi perkembangan penggunaan dana ADD

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 16

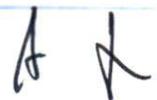
- (1) Pembinaan dan pengawasan ADD dilaksanakan oleh Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat desa dan camat.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan ADD meliputi:
 - a. Pengawasan yang dilakukan oleh APIP;
 - b. Pengawasan yang dilakukan oleh Camat;
 - c. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD; dan
 - d. Pengawasan yang dilakukan oleh Masyarakat Desa.

BAB VII

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 17

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan selama satu tahun.

PARAF KOORDINATOR	ASI
	

- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima per triwulan pada bulan berjalan.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan sebagai berikut:
 - a. kepala desa memperoleh penghasilan tetap sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) per bulan;
 - b. sekretaris desa memperoleh Penghasilan Tetap sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. kepala urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun masing-masing memperoleh Penghasilan Tetap sebesar Rp.1.300,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 18

- (1) Kepala Desa yang tidak memenuhi dan mematuhi dalam ketentuan Peraturan Bupati ini, baik dari pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan ADD atau dengan sengaja menggunakan dana ADD dimaksud untuk kepentingan pribadi akan diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Kepala Desa yang tidak memasukkan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun sebelumnya tidak akan diberikan surat rekomendasi pencairan tahun anggaran berikutnya.
- (3) Kepala Desa yang tidak mengurus dan melengkapi kelengkapan administrasi pencairan ADD sampai pada akhir tahun anggaran 2025 yang berakibat tidak keluarnya dana ADD tanpa alasan, maka tidak diberikan alokasi anggaran tahun berikutnya.
- (4) Dana ADD yang dimaksud pada ayat (3) akan dikembalikan pada Kas Daerah.

Pasal 19

- (1) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), maka diberikan sanksi penundaan dan/atau tidak diberikan penghasilan tetap Kepala Desa dan BPD paling lama 6 (enam) bulan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF KOORDINASI

(Handwritten signatures)

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
pada tanggal : 17 Maret 2025

BUPATI KONAWE,



H. YUSRAN AKBAR

Diundangkan di Unaaha
pada tanggal 17 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,

FERDINAND

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2025 NOMOR 696

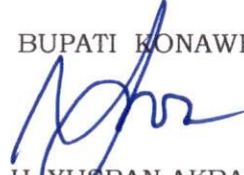
PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	Gubernur	[Signature]
2	Bupati	[Signature]
3	DMD	[Signature]
4	Ketang Hutan	[Signature]
5		

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PENGALOKASIAN ANGGARAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN PENGGUNAAN ADD TAHUN 2025 MASING-MASING DESA
UNTUK KELOMPOK A

1		NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	Vol	Sat	JUMLAH (Rp)
	1	2	3	4	5		6
	A	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN					
		SILTAP/TUNJANGAN(PNS)					
		1	KEPALA DESA	3,000,000.00	12	ob	36,000,000.00
		2	SEKDES	1,500,000.00	12	ob	18,000,000.00
		3	KASI PEMERINTAHAN	1,300,000.00	12	ob	15,600,000.00
		4	KASI KESEJAHTERAAN	1,300,000.00	12	ob	15,600,000.00
		5	KASI PELAYANAN	1,300,000.00	12	ob	15,600,000.00
		6	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	1,300,000.00	12	ob	15,600,000.00
		7	KAUR KEUANGAN	1,300,000.00	12	ob	15,600,000.00
		8	KAUR PERENCANAAN	1,300,000.00	12	ob	15,600,000.00
		9	KA DUSUN I	1,300,000.00	12	ob	15,600,000.00
		10	KA DUSUN II	1,300,000.00	12	ob	15,600,000.00
		11	KA DUSUN III	1,300,000.00	12	ob	15,600,000.00
		INSENTIF					
		1	RT(6 Org)	700,000.00	72	ob	50,400,000.00
		2	PERAWAT DESA	1,000,000.00	12	ob	12,000,000.00
		3	GURU TPQ	600,000.00	12	ob	7,200,000.00
		4	IMAM DESA	600,000.00	12	ob	7,200,000.00
		TUNJANGAN					
		1	BPD				
			- KETUA BPD	1,000,000.00	12	ob	12,000,000.00
			- WAKIL KETUA	900,000.00	12	ob	10,800,000.00
			- SEKRETARIS BPD	800,000.00	12	ob	9,600,000.00
			- ANGGOTA	700,000.00	12	ob	8,400,000.00
			- ANGGOTA	700,000.00	12	ob	8,400,000.00
		JAMINAN SOSIAL KADES/ IWP KADES, PERANGKAT DESA, RT, IMAM DESA ATAU SEBUTAN LAINNYA DAN GURU TPQ					
		1	IWP 5 %	1,265,000.00	12	ob	15,180,000.00
		2	BPJS TENAGA KERJA	16,800	396	ob	6,652,800.00
		OPRASIONAL					
		1	ATK KANTOR	695,500.00	1	Ls	695,500.00
		2	PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH	19,294,800.00	1	Ls	19,294,800.00
	B	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
		1	OPRASIONAL PKK	2,500,000.00	1	pkt	2,500,000.00
		2	OPRASIONAL LPM	1,000,000.00	1	pkt	1,000,000.00
		3	OPRASIONAL KARANG TARUNA	1,000,000.00	1	pkt	1,000,000.00
		4	OPRASIONAL BPD	1,500,000.00	1	pkt	1,500,000.00
		5	OPRASIONAL MAJELIS TAKLIM	1,000,000.00	1	pkt	1,000,000.00
		6	INSENTIF PABITARA	700,000.00	12	ob	8,400,000.00
		7	INSENTIF TONOMOTUO	700,000.00	12	ob	8,400,000.00
		8	INSENTIF MOMBOWULEAKO /	350,000.00	12	ob	4,200,000.00
		9	INSENTIF OSUDO / AJUDAN TOLEA	350,000.00	12	ob	4,200,000.00
		10	BANTUAN UMKM DESA	57,000,000.00	1	Ls	57,000,000.00
							451,423,100.00
		JUMLAH			263	Desa	118,724,275,300.00

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Ba p p r e	
3	P m p	
4	k a h a g h u l l a m	
5		

BUPATI KONAWE

H. YUSRAN AKBAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PENGALOKASIAN ANGGARAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN PENGGUNAAN ADD TAHUN 2025 MASING-MASING DESA
UNTUK KELOMPOK B

2		NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	Vol	Sat	JUMLAH (Rp)
	1	2	3	4	5		6
	A	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN					
		SILTAP/TUNJANGAN(PNS)					
		1	KEPALA DESA	3,000,000.00	12	ob	36,000,000.00
		2	SEKDES	1,500,000.00	12	ob	18,000,000.00
		3	KASI PEMERINTAHAN	1,300,000.00	12	ob	15,600,000.00
		4	KASI KESEJAHTERAAN	1,300,000.00	12	ob	15,600,000.00
		5	KASI PELAYANAN	1,300,000.00	12	ob	15,600,000.00
		6	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	1,300,000.00	12	ob	15,600,000.00
		7	KAUR KEUANGAN	1,300,000.00	12	ob	15,600,000.00
		8	KAUR PERENCANAAN	1,300,000.00	12	ob	15,600,000.00
		9	KA DUSUN I	1,300,000.00	12	ob	15,600,000.00
		10	KA DUSUN II	1,300,000.00	12	ob	15,600,000.00
		11	KA DUSUN III	1,300,000.00	12	ob	15,600,000.00
		INSENTIF					
		1	RT(6 Org)	700,000.00	72	ob	50,400,000.00
		2	PERAWAT DESA	1,000,000.00	12	ob	12,000,000.00
		3	GURU TPQ	600,000.00	12	ob	7,200,000.00
		4	IMAM DESA	600,000.00	12	ob	7,200,000.00
		5	PENDETA/MANGKU	600,000.00	12	ob	7,200,000.00
		TUNJANGAN					
		1	BPD				
			- KETUA BPD	1,000,000.00	12	ob	12,000,000.00
			- WAKIL KETUA	900,000.00	12	ob	10,800,000.00
			- SEKRETARIS BPD	800,000.00	12	ob	9,600,000.00
			- ANGGOTA	700,000.00	12	ob	8,400,000.00
			- ANGGOTA	700,000.00	12	ob	8,400,000.00
		JAMINAN SOSIAL KADES/ IWP KADES, PERANGKAT DESA, RT, IMAM DESA ATAU SEBUTAN LAINNYA DAN GURU TPQ					
		1	IWP 5 %	1,295,000.00	12	ob	15,540,000.00
		2	BPJS TENAGA KERJA	16,800	408	ob	6,854,400.00
		OPRASIONAL					
		1	ATK KANTOR	695,500.00	1	Ls	695,500.00
		2	PEMBENTUKAN KOPERASI DESA	19,294,800.00	1	Ls	19,294,800.00
	B	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
		1	OPRASIONAL PKK	2,500,000.00	1	pkt	2,500,000.00
		2	OPRASIONAL LPM	1,000,000.00	1	pkt	1,000,000.00
		3	OPRASIONAL KARANG TARUNA	1,000,000.00	1	pkt	1,000,000.00
		4	OPRASIONAL BPD	1,500,000.00	1	pkt	1,500,000.00
		5	OPRASIONAL MAJELIS TAKLIM	1,000,000.00	1	pkt	1,000,000.00
		6	INSENTIF PABITARA	700,000.00	12	ob	8,400,000.00
		7	INSENTIF TONOMOTUO	700,000.00	12	ob	8,400,000.00
		8	INSENTIF MOMBOWULEAKO /	350,000.00	12	ob	4,200,000.00
		9	INSENTIF OSUDO / AJUDAN TOLEA	350,000.00	12	ob	4,200,000.00
		10	BANTUAN UMKM DESA	57,000,000.00	1	Ls	57,000,000.00
							402,184,700.00
		JUMLAH			22	Desa	8,848,063,400.00

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1		
2	Bappera	
3	Pmp	
4	Kabag Hukum	
5		

BUPATI KONAWE

H. YUSRAN AKBAR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PENGALOKASIAN ANGGARAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN PENGGUNAAN ADD TAHUN 2025 MASING-MASING DESA
UNTUK KELOMPOK C

3		NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	Vol	Sat	JUMLAH (Rp)
	1	2	3	4	5		6
A PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN							
			SILTAP/TUNJANGAN(PNS)				
	1		KEPALA DESA	3,000,000.00	12	ob	36,000,000.00
	2		SEKDES	1,500,000.00	12	ob	18,000,000.00
	3		KASI PEMERINTAHAN	1,300,000.00	12	ob	15,600,000.00
	4		KASI KESEJAHTERAAN	1,300,000.00	12	ob	15,600,000.00
	5		KASI PELAYANAN	1,300,000.00	12	ob	15,600,000.00
	6		KAUR TATA USAHA DAN UMUM	1,300,000.00	12	ob	15,600,000.00
	7		KAUR KEUANGAN	1,300,000.00	12	ob	15,600,000.00
	8		KAUR PERENCANAAN	1,300,000.00	12	ob	15,600,000.00
	9		KA DUSUN I	1,300,000.00	12	ob	15,600,000.00
	10		KA DUSUN II	1,300,000.00	12	ob	15,600,000.00
	11		KA DUSUN III	1,300,000.00	12	ob	15,600,000.00
			INSENTIF				
	1		RT(6 Org)	700,000.00	72	ob	50,400,000.00
	2		PERAWAT DESA	1,000,000.00	12	ob	12,000,000.00
	3		GURU TPQ	600,000.00	12	ob	7,200,000.00
	4		IMAM DESA	600,000.00	12	ob	7,200,000.00
	5		PENDETA	600,000.00	12	ob	7,200,000.00
	6		MANGKU	600,000.00	12	ob	7,200,000.00
			TUNJANGAN				
	1		BPD				
			- KETUA BPD	1,000,000.00	12	ob	12,000,000.00
			- WAKIL KETUA	900,000.00	12	ob	10,800,000.00
			- SEKRETARIS BPD	800,000.00	12	ob	9,600,000.00
			- ANGGOTA	700,000.00	12	ob	8,400,000.00
			- ANGGOTA	700,000.00	12	ob	8,400,000.00
			JAMINAN SOSIAL KADES/ IWP KADES, PERANGKAT DESA, RT, IMAM DESA ATAU SEBUTAN LAINNYA DAN GURU TPQ				
	1		IWP 5 %	1,325,000.00	12	ob	15,900,000.00
	2		BPJS TENAGA KERJA	16,800	420	ob	7,056,000.00
			OPRASIONAL				
	1		ATK KANTOR	695,500.00	1	Ls	695,500.00
	2		PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH	19,294,800.00	1	Ls	19,294,800.00
B PEMBINAAN KEMASYARAKATAN							
	1		OPRASIONAL PKK	2,500,000.00	1	pkt	2,500,000.00
	2		OPRASIONAL LPM	1,000,000.00	1	pkt	1,000,000.00
	3		OPRASIONAL KARANG TARUNA	1,000,000.00	1	pkt	1,000,000.00
	4		OPRASIONAL BPD	1,500,000.00	1	pkt	1,500,000.00
	5		OPRASIONAL MAJELIS TAKLIM	1,000,000.00	1	pkt	1,000,000.00
	6		INSENTIF PABITARA	700,000.00	12	ob	8,400,000.00
	7		INSENTIF TONOMOTUO	700,000.00	12	ob	8,400,000.00
	8		INSENTIF MOMBOWULEAKO /	350,000.00	12	ob	4,200,000.00
	9		INSENTIF OSUDO / AJUDAN TOLEA	350,000.00	12	ob	4,200,000.00
	10		BANTUAN UMKM DESA	57,000,000.00	1	Ls	57,000,000.00
			PARAF KOORDINASI				409,946,300
			JUMLAH		5	Desa	2,049,731,500

NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	Shah Bay Pica	A
2		
3	PMU	
4	Ketua Hukum	
5		

BUPATI KONAWE

H YUSRAN AKBAR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PENGALOKASIAN ANGGARAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN PENGGUNAAN ADD TAHUN 2025 MASING-MASING DESA
UNTUK KELOMPOK D

4	NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	Vol	Sat	JUMLAH (Rp)
	1	2	3	4	5	6
A PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN						
	SILTAP/TUNJANGAN(PNS)					
	1	KEPALA DESA	3,000,000.00	12	ob	36,000,000.00
	2	SEKDES	1,500,000.00	12	ob	18,000,000.00
	3	KASI PEMERINTAHAN	1,300,000.00	12	ob	15,600,000.00
	4	KASI KESEJAHTERAAN	1,300,000.00	12	ob	15,600,000.00
	5	KASI PELAYANAN	1,300,000.00	12	ob	15,600,000.00
	6	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	1,300,000.00	12	ob	15,600,000.00
	7	KAUR KEUANGAN	1,300,000.00	12	ob	15,600,000.00
	8	KAUR PERENCANAAN	1,300,000.00	12	ob	15,600,000.00
	9	KA DUSUN I	1,300,000.00	12	ob	15,600,000.00
	10	KA DUSUN II	1,300,000.00	12	ob	15,600,000.00
	11	KA DUSUN III	1,300,000.00	12	ob	15,600,000.00
	INSENTIF					
	1	RT(6 Org)	700,000.00	72	ob	50,400,000.00
	2	PERAWAT DESA	1,000,000.00	12	ob	12,000,000.00
	3	GURU TPQ	600,000.00	12	ob	7,200,000.00
	4	IMAM DESA	600,000.00	12	ob	7,200,000.00
	4	PENDETA	600,000.00	12	ob	7,200,000.00
	6	MANGKU	600,000.00	12	ob	7,200,000.00
	7	BIKSU/PASTOR	600,000.00	12	ob	7,200,000.00
	TUNJANGAN					
	1	BPD				
		- KETUA BPD	1,000,000.00	12	ob	12,000,000.00
		- WAKIL KETUA	900,000.00	12	ob	10,800,000.00
		- SEKRETARIS BPD	800,000.00	12	ob	9,600,000.00
		- ANGGOTA	700,000.00	12	ob	8,400,000.00
		- ANGGOTA	700,000.00	12	ob	8,400,000.00
	JAMINAN SOSIAL KADES/ IWP KADES, PERANGKAT DESA, RT, IMAM DESA ATAU SEBUTAN LAINNYA DAN GURU TPQ					
	1	IWP 5 %	1,355,000.00	12	ob	16,260,000.00
	2	BPJS TENAGA KERJA	16,800	432	ob	7,257,600.00
	OPRASIONAL					
	1	ATK KANTOR	629,000.00	1	Ls	629,000.00
	2	PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH	19,294,800.00	1	Ls	19,294,800.00
B PEMBINAAN KEMASYARAKATAN						
	1	OPRASIONAL PKK	2,500,000.00	1	pkt	2,500,000.00
	2	OPRASIONAL LPM	1,000,000.00	1	pkt	1,000,000.00
	3	OPRASIONAL KARANG TARUNA	1,000,000.00	1	pkt	1,000,000.00
	4	OPRASIONAL BPD	1,500,000.00	1	pkt	1,500,000.00
	5	OPRASIONAL MAJELIS TAKLIM	1,000,000.00	1	pkt	1,000,000.00
	6	INSENTIF PABITARA	700,000.00	12	ob	8,400,000.00
	7	INSENTIF TONOMOTUO	700,000.00	12	ob	8,400,000.00
	8	INSENTIF MOMBOWULEAKO /	350,000.00	12	ob	4,200,000.00
	9	INSENTIF OSUDO / AJUDAN TOLEA	350,000.00	12	ob	4,200,000.00
	10	BANTUAN UMKM DESA	57,000,000.00	1	Ls	57,000,000.00
	NO	NAMA / JABATAN	PARAF			417,641,400
	JUMLAH			1	Desa	417,641,400

1	Sub	
2	Dappira	
3	Pmp	
4	Keag Hukun	
5		

BUPATI KONAWE

H YUSRAN AKBAR

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PENGALOKASIAN ANGGARAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KONAWE TAHUN ANGGARAN 2025

KLP	No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2023	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA							KET		
				BIDANG PEMERINTAHAN			JAMINAN SOSIAL		PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			OPRASIONAL	
				SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	IWP 5%	BPJS	LEMBAGA DESA	UMKM		ATK	PEMBENTUKAN KOPDES MERAH PUTIH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	1	ROUTA	3,000,000										
	1	DESA TIRAWONUA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	2	DESA TANGGOLA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	3	DESA WALANDAWE	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	4	DESA PUUWIWIRANO	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	5	DESA PARUDONGKA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	6	DESA LALOMERUI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	2	LATOMA											
	7	DESA LATOMA JAYA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	8	DESA ANDOLUTO	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	9	DESA PINOLE	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	10	DESA WAWOLATOMA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	11	DESA TITIOWA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	12	DESA NESOWI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	13	DESA AMBEKAIRI UTAMA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	14	DESA LALOWATA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	15	DESA ANGONGA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	16	DESA AMBONIKI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	3	ASINUA											
	17	DESA LASADA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	18	DESA ANGOHI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	19	DESA AWUA JAYA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	20	DESA ASIPAKO	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	21	DESA ASINUA JAYA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	22	DESA NEKUDU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	4	PADANGGUN											
	23	DESA PADANG MEKAR	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	24	DESA ATODOPI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	

1 2 1

KLP	No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2023	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA								KET	
				BIDANG PEMERINTAHAN			JAMINAN SOSIAL		PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		OPRASIONAL		
				SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	IWP 5%	BPJS	LEMBAGA DESA	UMKM	ATK		PEMBENTUKAN KOPDES MERAH PUTIH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		25 DESA MEKAR JAYA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		26 DESA ALEUTI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		27 DESA MATAHORI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		28 DESA SAMBAOSU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		29 DESA PADANGGUNI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		30 DESA GARUDA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		31 DESA MATANGGORAI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		32 DESA LANGGEA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	5	ABUKI											
		33 DESA UNAASI JAYA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		34 DESA ANGGORO	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		35 DESA ARUBIA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		36 DESA PUNGALUKU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		37 DESA SAMBEANI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		38 DESA PADANGGUNU UTAMA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		39 DESA KASUWURA INDAH	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		40 DESA WALAI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		41 DESA KUMAPO	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		42 DESA ASOLU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		43 DESA EPEEYA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	6	TONGAUNA UTARA											
		44 DESA SANUANGGAMO	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		45 DESA BAROWILA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		46 DESA NAMBEA BORU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		47 DESA ANGGOHU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		48 DESA ANDALAMBE	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		49 DESA ULU 'AO	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		50 DESA OLO ONUA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		51 DESA WAWORODA JAYA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	7	TONGAUNA											
		52 DESA LALONGGOWUNA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		53 DESA MOMEA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		54 DESA ANDEPOSANDU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		55 DESA ASAO	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		56 DESA AMBEPULU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	8	ANGGABERI											

PARAF KOORDINASI

[Handwritten signature]

KLP	No	KECAMATAN/ DESA		JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2023	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA								KET	
					BIDANG PEMERINTAHAN			JAMINAN SOSIAL		PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		OPRASIONAL		
					SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	IWP 5%	BPJS	LEMBAGA DESA	UMKM	ATK		PEMBENTUKAN KOPDES MERAH PUTIH
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		57	DESA WUNDUONGOHI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		58	DESA LEREHOMA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	9	UEPAI												
		59	DESA MATAHOALU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		60	DESA BARUGA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		61	DESA ANGGOPIU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		62	DESA ANGGAWO	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		63	DESA PUURODA JAYA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		64	DESA AMERORO	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		65	DESA RAWUA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		66	DESA TAMESANDI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		67	DESA PANGGULAWU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		68	DESA TANGGODIPO	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		69	DESA AMAROA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	10	LAMBUYA												
		70	DESA WATAREMA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		71	DESA WONUA HOA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		72	DESA MERAKA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		73	DESA WAWORAHA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	74	DESA TANGGOBU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800
	75	DESA TETE MBOMUA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800
	76	DESA ASAKI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800
	77	DESA AWULITI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800
	78	DESA AMBERI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800
	11	PURIALA										
	79	DESA UNGGULINO	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800
	80	DESA PUUHOPA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800
	81	DESA WAWOSANGGULA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800
	82	DESA POANAHA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800
	83	DESA AHUA WALI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800
	84	DESA WATUSA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800
	85	DESA LALONGGATU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800
	86	DESA PUUSANGI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800
	87	DESA LALOONAH	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800

11

KLP	No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2023	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA								KET	
				BIDANG PEMERINTAHAN			JAMINAN SOSIAL		PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		OPRASIONAL		
				SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	IWP 5%	BPJS	LEMBAGA DESA	UMKM	ATK		PEMBENTUKAN KOPDES MERAH PUTIH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		88 DESA MOKALELEO	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		89 DESA WONUA MOROME	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		90 DESA TETE HAKA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		91 DESA SONAI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	12	ONEMBUTE											
		92 DESA NAPOOSI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		93 DESA KUMAPO	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		94 DESA KASUMEIA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		95 DESA ANGGA LOOSI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		96 DESA ANA ONEMBUTE	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		97 DESA TRI MULYA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		98 DESA SILEA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		99 DESA ULU ONEMBUTE	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		100 DESA TAWA PANDERE	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	13	WAWOTOBI											
		101 DESA KASU MEWUHO	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		102 DESA KUKULURI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		103 DESA KORUMBA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		104 DESA ANA LAHAMBUTI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		105 DESA ANGGO TOA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	14	KONAWE											
		106 DESA MEKOWU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		107 DESA WONUAMBAE	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		108 DESA HUDOA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		109 DESA UELAWU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		110 DESA PUUWONUA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		111 DESA UETE	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		112 DESA ASINOWOWO	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	15	WONGGEDUKU											
		113 DESA LALOH AO	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		114 DESA BENDEWUTA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		115 DESA WUKUSAO	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		116 DESA WAWOONE	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		117 DESA ANGGORO	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		118 DESA DAWI-DAWI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		119 DESA WOWASOLO	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	

PAJARAN KOTA INDAH

1 1 1

KLP	No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2023	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA							KET		
				BIDANG PEMERINTAHAN			JAMINAN SOSIAL		PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			OPRASIONAL	
				SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	IWP 5%	BPJS	LEMBAGA DESA	UMKM		ATK	PEMBENTUKAN KOPDES MERAH PUTIH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		120 DESA TETE MOTAHA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		121 DESA TAWAROLONDO	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		122 DESA LALOUSU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		123 DESA LANGGONAWAWE	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		124 DESA POLANDANGI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		125 DESA WAWONGGOLE	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	16	WONGGEDUKU BARAT											
		126 DESA LAMBANGI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		127 DESA PUDAY	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		128 DESA ANGGADOLA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		129 DESA LAHOTUTU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		130 DESA TOBIMEITA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		131 DESA WATURAI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		132 DESA RANOTUNDOBU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		133 DESA LAMOKUNI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		134 DESA WONGGEDUKU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		135 DESA BARUGA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		136 DESA AMBUUWIU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		137 DESA TETEWONUA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		138 DESA TETEONA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		139 DESA KASUKIA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	17	MELUHU											
		140 DESA LAMELAI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		141 DESA SAMBASULE	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		142 DESA AHULOA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		143 DESA TUDA MEASO	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		144 DESA LAROWIU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		145 DESA LALOPISI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	18	AMONGGEDO											
		146 DESA MATABURA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		147 DESA WARANDETE	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		148 DESA BENUA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		149 DESA LALOMBONDA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		150 DESA WAWOHINE	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		151 DESA DUNGUA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		152 DESA AMONGGEDO	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		153 DESA MENDIKONU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	

AKI

KLP	No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2023	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA							KET		
				BIDANG PEMERINTAHAN			JAMINAN SOSIAL		PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			OPRASIONAL	
				SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	IWP 5%	BPJS	LEMBAGA DESA	UMKM		ATK	PEMBENTUKAN KOPDES MERAH PUTIH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		154 DESA LALONONA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		155 DESA WATULAWU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		156 DESA MATAIWOI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	19	PONDIDAHA											
		157 DESA LALODANGGE	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		158 DESA TIRA WUTA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		159 DESA SULEMANDARA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		160 DESA AHUA WATU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		161 DESA MUMUNDOWU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		162 DESA LALONGGOTOMI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		163 DESA AMESIU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		164 DESA PUUMBINISI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		165 DESA HONGOA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		166 DESA WONUA MONAPA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		167 DESA LAHONGGUMBI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		168 DESA WOWALAHAMBUTI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		169 DESA BELATU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	20	BESULUTU											
		170 DESA PUNG GALUKU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		171 DESA AMOSILU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		172 DESA ULU POHARA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		173 DESA ONEMBUTE	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		174 DESA ASUNDE	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		175 DESA LABELA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		176 DESA LALOUMERA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		177 DESA PUUNDOHO	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		178 DESA LALOWULO	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		179 DESA PUULOWARU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		180 DESA SILEA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		181 DESA WAWORAHA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		182 DESA RANOMOLUA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		183 DESA ANDOMESINGGO	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		184 DESA LAWONUA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	21	SAMPARA											
		185 DESA POLUA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		186 DESA BAO - BAO	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	

PAZ... KO... N...
A T T

KLP	No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2023	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA							KET		
				BIDANG PEMERINTAHAN			JAMINAN SOSIAL		PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			OPRASIONAL	
				SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	IWP 5%	BPJS	LEMBAGA DESA	UMKM		ATK	PEMBENTUKAN KOPDES MERAH PUTIH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		187 DESA PUULORO	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		188 DESA TOTOMBE JAYA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		189 DESA BAENI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		190 DESA WAWO ANDAROA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		191 DESA ANDAROA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		192 DESA BONDOLA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		193 DESA POHARA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		194 DESA ANDADOWI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		195 DESA KONGGA MEA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		196 DESA ANDEPALI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		197 DESA WAWO LIMBUE	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	22	ANGGALOMOARE											
		198 DESA ANDOBEU JAYA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		199 DESA LASOSO	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		200 DESA ANGGALOMOARE JAYA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		201 DESA GALU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		202 DESA ABELISAWA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		203 DESA ANGGALOMOARE	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		204 DESA PUUSANGI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		205 DESA PUUSAWAH JAYA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		206 DESA LAKOMEA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		207 DESA TABANGGELE	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	23	LALONGGASU MEETO											
		208 DESA PUUWONUA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		209 DESA LALOMBONDA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		210 DESA TOOLAWAWO	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		211 DESA BATU GONG	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		212 DESA WAWOBUNGI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		213 DESA TOLI - TOLI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		214 DESA WATU NGGARANDU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		215 DESA LALONGGASUMEETO	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		216 DESA NII TANASA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		217 DESA RAPAMBINOPAKA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		218 DESA BUMI INDAH	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	24	BONDOLA											
		219 DESA PEBUNOOHA DALAM	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	

PARAF KOORDINASI

A f t

KLP	No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2023	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA							KET		
				BIDANG PEMERINTAHAN			JAMINAN SOSIAL		PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			OPRASIONAL	
				SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	IWP 5%	BPJS	LEMBAGA DESA	UMKM		ATK	PEMBENTUKAN KOPDES MERAH PUTIH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		220 DESA DIOLO	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		221 DESA RAMBU KONGGA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		222 DESA RUMBIA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		223 DESA LALONGGALUKU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		224 DESA LANGGALUKU TIMUR	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		225 DESA PEBUNOOHA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		226 DESA LAOSU JAYA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	25	MOROSI											
		227 DESA TANGGOBU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		228 DESA TONDOWATU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		229 DESA MOROSI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		230 DESA WONUA MORINI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		231 DESA PAKU JAYA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		232 DESA PUURUI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		233 DESA MENDIKONU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		234 DESA PORARA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		235 DESA BESU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		236 DESA PAKU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	26	KAPOIALA											
		237 DESA LABOTOI JAYA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		238 DESA TANI INDAH	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		239 DESA PEREO'A	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		240 DESA LAMENDORA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		241 DESA MUARA SAMPARA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		242 DESA SAMABARAASI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		243 DESA LABOTOY	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		244 DESA LALIMBUE	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		245 DESA ULU LALIMBUE	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		246 DESA KAPOIALA BARU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		247 DESA LALIMBUE JAYA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		248 DESA TOMBA WATU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		249 DESA LALONGGOMBUNO	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	27	SOROPIA											
		250 DESA BAJO INDAH	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		251 DESA ATO WATU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		252 DESA SOROPIA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		253 DESA TELAGA BIRU	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	

PAJARAN KORDINASI

K f y

KLP	No	KECAMATAN/ DESA		JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2023	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA								KET	
					BIDANG PEMERINTAHAN			JAMINAN SOSIAL		PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		OPRASIONAL		
					SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	IWP 5%	BPJS	LEMBAGA DESA	UMKM	ATK		PEMBENTUKAN KOPDES MERAH PUTIH
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		254	DESA SORUE JAYA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		255	DESA WAWORAHA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		256	DESA SAPONDA LAUT	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		257	DESA LEPPE	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		258	DESA BAJOE	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		259	DESA SAPONDA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		260	DESA TAPULAGA	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		261	DESA BOKORI	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		262	DESA MEKAR	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		263	DESA SAWAPUDO	451,423,100	194,400,000	76,800,000	49,200,000	15,180,000	6,652,800	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	3	ASINUA												
B		264	DESA AWUASARI	459,184,700	194,400,000	84,000,000	49,200,000	15,540,000	6,854,400	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	

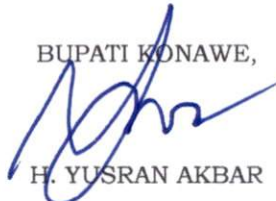
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		14
	4	PADANGGUN											
B	265	DESA ALOSIKA	459,184,700	194,400,000	84,000,000	49,200,000	15,540,000	6,854,400	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
		TONGAUNA UTARA											
B	266	DESA PUUNDOPI	459,184,700	194,400,000	84,000,000	49,200,000	15,540,000	6,854,400	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
B	267	DESA AMBOPI	459,184,700	194,400,000	84,000,000	49,200,000	15,540,000	6,854,400	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	9	UEPAI											
B	268	DESA OLO - OLOHO	459,184,700	194,400,000	84,000,000	49,200,000	15,540,000	6,854,400	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
B	269	DESA TAWARO TEBOTA	459,184,700	194,400,000	84,000,000	49,200,000	15,540,000	6,854,400	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
B	270	DESA HUMBOTO	459,184,700	194,400,000	84,000,000	49,200,000	15,540,000	6,854,400	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
B	271	DESA TAWA MELEWE	459,184,700	194,400,000	84,000,000	49,200,000	15,540,000	6,854,400	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	11	PURIALA											
B	272	DESA PURIALA	459,184,700	194,400,000	84,000,000	49,200,000	15,540,000	6,854,400	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
B	273	DESA TETE WATU	459,184,700	194,400,000	84,000,000	49,200,000	15,540,000	6,854,400	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	12	ONEMBUTE											
B	274	DESA ULU MERAKA	459,184,700	194,400,000	84,000,000	49,200,000	15,540,000	6,854,400	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
B	275	DESA MATAIWOI	459,184,700	194,400,000	84,000,000	49,200,000	15,540,000	6,854,400	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	14	KONAWE											
B	276	DESA SANGGONA	459,184,700	194,400,000	84,000,000	49,200,000	15,540,000	6,854,400	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	15	WONGGEDUKU											
B	277	DESA DURIAASI	459,184,700	194,400,000	84,000,000	49,200,000	15,540,000	6,854,400	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	

DAFTAR KOORDINASI

AK d

KLP	No	KECAMATAN/ DESA		JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2023	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA								KET	
					BIDANG PEMERINTAHAN			JAMINAN SOSIAL		PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		OPRASIONAL		
					SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	IWP 5%	BPJS	LEMBAGA DESA	UMKM	ATK		PEMBENTUKAN KOPDES MERAH PUTIH
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	17	MELUHU												
B		278	DESA AHUHU	459,184,700	194,400,000	84,000,000	49,200,000	15,540,000	6,854,400	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
B		279	DESA WOERAHI	459,184,700	194,400,000	84,000,000	49,200,000	15,540,000	6,854,400	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	18	AMONGGEDO												
B		280	DESA ANAHINUNU	459,184,700	194,400,000	84,000,000	49,200,000	15,540,000	6,854,400	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
B		281	DESA ULU BENUA	459,184,700	194,400,000	84,000,000	49,200,000	15,540,000	6,854,400	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	19	PONDIDAHA												
B		282	DESA LALOIKA	459,184,700	194,400,000	84,000,000	49,200,000	15,540,000	6,854,400	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
B		283	DESA WAWOLEMO	459,184,700	194,400,000	84,000,000	49,200,000	15,540,000	6,854,400	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	13	WAWOTOB												
B		284	DESA NARIO INDAH	459,184,700	194,400,000	84,000,000	49,200,000	15,540,000	6,854,400	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
B		285	DESA KARANDU	459,184,700	194,400,000	84,000,000	49,200,000	15,540,000	6,854,400	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	9	UEPAI												
C		286	DESA LANGGOMEA	466,946,300	194,400,000	91,200,000	49,200,000	15,900,000	7,056,000	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
C		287	DESA KASAEDA	466,946,300	194,400,000	91,200,000	49,200,000	15,900,000	7,056,000	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	19	PONDIDAHA												
C		288	DESA AMBULANU	466,946,300	194,400,000	91,200,000	49,200,000	15,900,000	7,056,000	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
C		289	DESA WONUA MANDARA	466,946,300	194,400,000	91,200,000	49,200,000	15,900,000	7,056,000	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
	18	AMONGGEDO		466,946,300	194,400,000	91,200,000	49,200,000	15,900,000	7,056,000	32,200,000	57,000,000	695,500	19,294,800	
C		290	DESA PUASANA											
	16	WONGGEDUKU BARAT												
D		291	DESA LINONGGASAI	455,346,600	194,400,000	98,400,000	49,200,000	16,260,000	7,257,600	32,200,000	57,000,000	629,000	19,294,800	
		JUMLAH		131,635,711,600	56,570,400,000	22,600,800,000	14,317,200,000	4,429,980,000	1,943,020,800	9,370,200,000	16,587,000,000	202,324,000	5,614,786,800	

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	<i>Sekda</i>	<i>A</i>
2	<i>Bappeda</i>	<i>A</i>
3	<i>Prad</i>	<i>A</i>
4	<i>Ischug Hulan</i>	<i>A</i>
5		

BUPATI KONAWE,

H. YUSRAN AKBAR